

Daftar Pustaka

1. Buku – Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asman, 2021, *Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Muslim Kajian Teori, Praktik, dan Contoh Kasus*, Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadiwiyono, Suharyono M. 2020, *Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Offset Alumni, Bandung.
- , 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenamadia, Jakarta.
- Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. ke-1, Cet. Ke-3, Rajawali Press, Depok.

- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cet-1, Airlangga University Press, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1978, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abdurrahman dan Masrukhin, ctk. Kelima, Cakrawala Publishing, Jakarta, hlm. 553.
- Sarong, Hamid, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Yayasan Pena, Banda Aceh.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Arkola, Surabaya.
- Suadi, Amran, 2017, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, ed. Pertama, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-31, Intermasa, Jakarta.
- Suma, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman, Eman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Svinarky, Irene, 2019, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam Publisher, Batam.

Tehupeiory, Aartje, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Wibawanti, Erna Sri dan R Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.

Yulis, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Unimal, Malang

2. Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746..

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam.

3. Jurnal

Bafadhal, Faizah, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 4, Nomor 1, 2013.

Erwinsyahbana, Tengku dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan dalam Perkawinan” *Jurnal Varia Justicia*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2017.

Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor 2, 2015.

Muhammad Amin Almontazar, “Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, Nomor 2, 2019.

Rudito, Sulih, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata”, *Jurnal ilmu Hukum legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3, 2015.

4. Disertasi dan Tesis

Gania, Nida, “Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

Hasan, Eka Tenriabeng Prihasyanti, “Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 233/K/AG/2007)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Herdiana, Deta, “Tinjauan Pembatalan Akta Hibah Terhadap Harta Asal Yang Diberikan Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/1989/PN.YK. Jo. Pengadilan Tinggi Nomor 89/Pdt/1990/PTY. Jo. Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Pdt/1991)” *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Iskandar, Misbah, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Studi Pengadilaan Agama Menurut Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Sularto, Desy Kurniasih, “Tinjauan Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT di Luar Wilayah Kewenangannya (Studi Kasus Putusan PN No. 11/Pdt.G/2002/PN. Kalianda)”, *Tesis* Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2007

5. Internet

Maulidy, “Hibah dalam Islam”<https://islamicfamilylaw.iii.ac.id/question/hibah-dalam-islam/> diakses pada 2 oktober 2020.

Anonim. “Akta” <https://kbbi.web.id/akta> diakses pada pada tanggal 15 November 2020

Ali Masykuri H, Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (KombinasiTeori&Praktek),www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Eksekusi_Lelang_1languh_Praktis., diakses pada 28 Januari 2022